

LAPORAN THESIS

**IMPLEMENTASI *INFORMED CONSENT* PADA TINDAKAN MEDIS
OPERASI CITO DI RSUD DR. M.M DUNDA LIMBOTO KABUPATEN
GORONTALO**



MIRAH SYAFIRA MOHAMMAD

NIM 22.C2.0036

**MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

LAPORAN THESIS
IMPLEMENTASI *INFORMED CONSENT* PADA TINDAKAN MEDIS
OPERASI CITO DI RSUD DR. M.M DUNDA LIMBOTO KABUPATEN
GORONTALO

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum



MIRAH SYAFIRA MOHAMMAD
NIM 22.C2.0036

MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2024

ABSTRAK

Dokter sebelum melakukan tindakan medis seperti operasi cito, dokter harus memberikan informasi yang menjelaskan mengenai penyakit, jenis rawatan, resiko yang dapat terjadi sebelum, saat dan setelah operasi dilakukan, dan peluang kesembuhan pasien. Informasi tersebut disebut juga dengan *informed consent*. Pada pelaksanaannya masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan *informed consent* pada operasi cito. Padahal *informed consent* perlu untuk dilaksanakan sebelum adanya tindakan medis apapun untuk membuktikan bahwa tindakan medis tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan pasien maupun keluarga pasien. Namun, operasi cito pada dasarnya dilaksanakan dalam keadaan darurat yang mendesak dan terdapat kemungkinan bahwa persetujuan tidak dapat dimintakan terlebih dahulu demi melindungi nyawa pasien.

Berdasarkan hal tersebut, dirumuskanlah permasalahan: (1) bagaimana pengaturan *informed consent* pada tindakan medis operasi cito di RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo; (2) bagaimana pelaksanaan *informed consent* pada operasi cito di RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo; dan (3) apa hambatan dan solusi dari pelaksanaan *informed consent* dalam operasi cito di RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi *Informed Consent* Pada Tindakan Medis Operasi Cito Di RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi fakta hukum seputar *informed consent* pada tindakan medis operasi cito di RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo yang kemudian dikumpulkan menjadi suatu data tambahan yang diteliti pada penelitian ini dan dianalisis menggunakan metode spesifikasi penelitian deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai *informed consent* pada tindakan medis operasi cito di RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo telah diatur melalui kebijakan-kebijakan direksi maupun SPO yang ada yang penerapannya diberikan melalui formulir *informed consent* pada RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo. Pelaksanaan *informed consent* telah berjalan dengan cukup baik dan telah memenuhi sekurang-kurangnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang ada. Namun masih terdapat kekurangan-kekuarangan yang mengakibatkan timbulnya hambatan pada pelaksanaan *informed consent*. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya upaya penyuluhan hukum melalui media yang mudah dilihat, dibaca, dan dimengerti oleh masyarakat umum.

Keyword: *informed consent*, implementasi hukum, operasi cito

ABSTRACT

Before performing medical procedures such as cito surgery, doctors must provide information explaining the disease, type of treatment, risks that can occur before, during and after surgery, and the patient's chances of recovery. This information is also called informed consent. In its implementation, there are still many obstacles in implementing informed consent in cito surgery. In fact, informed consent needs to be implemented before any medical action to prove that the medical action is carried out based on the consent of the patient or the patient's family. However, cito surgery is basically carried out in urgent emergencies and there is a possibility that consent cannot be requested in advance in order to protect the patient's life.

Based on this, the problems are formulated regarding (1) how to regulate informed consent in cito surgery medical procedures at Dr. M. M. Dunda Limboto Hospital at Gorontalo Regency; (2) how to implement informed consent in cito surgery at Dr. M. M. Dunda Limboto Hospital, Gorontalo Regency; and (3) what are the obstacles and solutions to implementing informed consent in cito surgery at Dr. M. M. Dunda Limboto Hospital, Gorontalo Regency.

This study aims to analyze the Implementation of Informed Consent in Cito Operation Medical Actions at Dr. M. M. Dunda Limboto Hospital at Gorontalo Regency using an empirical legal research method. This method is used to identify legal facts surrounding informed consent in Cito operation medical actions at Dr. M. M. Dunda Limboto Hospital, Gorontalo Regency, which are then collected into additional data that are studied in this study and analyzed using a descriptive research specification method.

The results of this study concluded that the regulation regarding informed consent for the cito surgery at Dr. M. M. Dunda Limboto Regional Hospital at Gorontalo Regency has been regulated through the policies of the board of directors and existing SOPs, the implementation of which is given through the informed consent form at Dr. M. M. Dunda Limboto Regional Hospital at Gorontalo Regency. The implementation of informed consent has been running quite well and has met at least as regulated in the existing laws and regulations. However, there are still shortcomings that result in obstacles in the implementation of informed consent. These obstacles can be overcome by providing legal counseling efforts through media that are easy to see, read, and understand by the general public.

Keywords: cito surgery, informed consent, legal implementation